

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
PERSPEKTIF SANTRI PONDOK PESANTREN DAARUL
KHAIR KOTABUMI (STADI DI DESA KOTA ALAM
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Oleh

AGUSTIANA

NPM.1511010007

Jurusan : Pendidikan Agama Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
PERSPEKTIF SANTRI PONDOK PESANTREN DAARUL
KHAIR KOTABUMI (STADI DI DESA KOTA ALAM
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Oleh:

AGUSTIANA

NPM. 1511010007

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Wan Jamaludin Z. M. Ag
Pembimbing 2 : Dr. Sunarto. M.Pd.I

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

ABSTRAK

Islam merupakan Agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan ini. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tidak dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Secara Islam pembagian harta warisan telah ditentukan di dalam al-Qur'an yang membahas mengenai pembagian harta warisan sehingga tidak terdapat kecurangan atas perbedaan jumlah harta warisan yang diterima oleh ahli waris seperti yang telah diketahui bahwa, secara hukum adat terdapat perbedaan cara pembagian harta warisan yaitu pembagian pada anak laki-laki yang pertama, itu berbeda dengan pembagian anak laki-laki yang kedua, ketiga, dan seterusnya, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pandangan santri terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, serta bagaimanakah pembagian harta warisan menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah santri pondok pesantren Daarul Khair yang berjumlah 30 orang santri, sedangkan untuk sumber data sekunder nya penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di dalam Islam dan Adat. Data dianalisis dengan kualitatif melalui teknik analisis data reduction (*reduksi data*), data display (*penyajian data*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya dalam pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, pada pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun ini menurut pandangan santri pondok pesantren Daarul Khair terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima karena dapat dijadikan hukum dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dan pembagian tersebut harus melalui musyawarah mufakat keluarga, sedangkan sebagian yang lain menolak karena tidak sesuai dengan pedoman hidup umat Islam yaitu Al-Qur'an.

Kata Kunci: Harta Warisan, Santri, Pondok Pesantren.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : AGUSTIANA
NPM : 1511010007
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN PRESPEKTIF SANTRI PONDOK
PESANTREN DAARUL KHAIR KOTABUMI (STADI DI
DESA KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI
SELATAN).**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z, M.Ag
NIP. 197103211995031001

Pembimbing II


Dr. Sunarto, M.Pd.I

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam


Dr. Imam Syafeli, M. Ag
NIP. 196502191998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN PRESPEKTIF SANTRI PONDOK PESANTREN DAARUL
KHAIR KOTABUMI (STADI DI DESA KOTA ALAM KECAMATAN
KOTABUMI SELATAN).** Disusun oleh **Agustiana, NPM. 1511010007,**
Jurusan: **Pendidikan Agama Islam.** Telah diuji kan pada hari/tanggal: **Selasa, 16
April 2019**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: Dr. Imam Syafe'i, M.Ag

Sekretaris

: Era Budianti, M.Pd.I

Pembahas Utama

: Dr. Rijal Firdaos, M.Pd

Pembahas Pendamping I: Prof.Dr. Wan Jamaluddin Z, M.Ag

Pembahas Pendamping II: Dr. Sunarto, M.Pd.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd

NIP. 195608101987031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. an-Nahl: 90)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Diponogoro: Jakarta, 2015) h. 277.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada:

1. Ayahanda Purnama dan Ibunda tercinta Dentina Wati yang telah banyak berjuang dan mendo'akan untuk keberhasilanku, terimakasih untuk untaian do'a yang mengiringi setiap langkahku, ku sadari pengorbananmu tidak akan terbalas, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku serta menuntunku dalam menentukan jalan hidupku yang InsyaAllah selalu diridhoi-Nya, yang bersusah payah bekerja tanpa mengeluh demi masa depan ku.
2. Kakekku Mat Ali dan Nenekku Sinar Wati serta Kakekku H. Cik Mud dan Nenekku H. Cik Dep yang selalu mendo'akan dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Kanjengku Septiana dan Atuku Rina Apriyana, Adikku tercinta Andika Rahmad Perdana dan Azmi Marzuq Putra, ketiga keponakanku Hadi Prayoga, Rafly Jaya Pratama, Hafiz Pranata, kakak iparku Rajo Tomi, Sejati Rahmad serta keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan memberi semangat, motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang selalu aku banggakan dan telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu akan aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Agustiana dilahirkan di desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Agustus 1996, Putri ketiga dari lima saudara. Dari pasangan Bapak Purnama dengan Ibu Dentina Wati.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kotabumi pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Sekolah Dasar Negeri 04 Kota Alam pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kotabumi dan diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kotabumi selesai pada tahun 2015. Mulai tahun 2015 penulis melanjutkan studi sarjana (SI) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Penulis mengikuti organisasi Pramuka, dan Baris-berbaris pada saat SD. Pada saat SMP penulis mengikuti organisasi Seni Tari, dan OSIS. Dan pada saat SMA penulis mengikuti, OSIS, MPK, Rohis, dan Seni Teater. Serta pada saat penulis melanjutkan Studi (SI) di UIN RIL Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI, penulis mengikuti, Ukm-f Rumah Dai, Ukm-f Ibroh, Ukm Bapinda, Ukm Hiqmah, Ukm Bahasa, Ikam Lampur, dan Organisasi Ekstra KAMMI.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Penulis mengawali pembuatan skripsi ini dengan segala kelapangan hati dan keikhlasan.”*Alhamdulillah*” atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan limpahan karunia kepada hambanya. Skripsi yang berjudul”*Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Presfektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (Stadi Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan)*” ini telah berhasil penulis selesaikan tepat waktu. Guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tak lupa selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu setia pada syafaatnya hingga akhir zaman. Terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Atas bantuan baik itu berupa dukungan, tenaga, maupun waktu dan materi. Tiada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih penulis selain” *Jazakumullah Khairan Katsira*” semoga kebaikan dari semua pihak di balas Allah dengan berlipat ganda. Adapun pihak-pihak yang berjasa itu diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

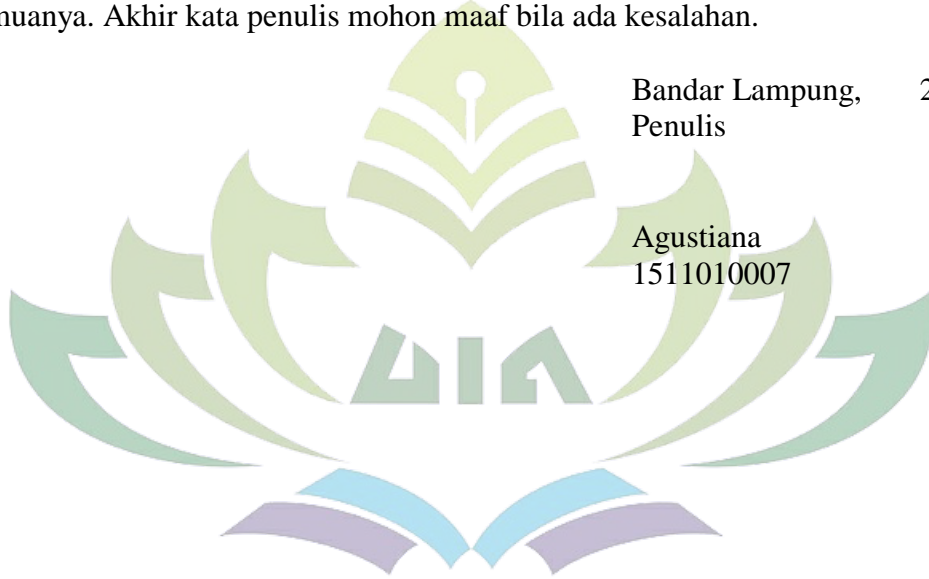
2. Dr. Imam Syafe'i, M.Ag., selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang selalu memberi bimbingan.
3. Prof. Dr. Wan Jamaludin Z. M.Ag.,Ph.D selaku pembimbing I dan Dr. Sunarto. M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Kh. Andi Komarhadi, S.Ag selaku pimpinan pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi, beserta seluruh pengurus serta ibu/ bapak guru Madrasah Aliyah dan santri yang telah membantu penulis dalam terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku The Power Of Cinta (Amel, Ardiana, Dian, Eka), MIA (Mae dan Indah) yang saling menguatkan dikala suka maupun duka, yang selalu mengingatkan dalam perjuangan yang tidak bisa terhitung dengan jarak dan waktu.
8. Teman-teman seperjuanganku di PAI khususnya PAI A, KKN, dan PPL, Ukm, Ukm-f maupun Organisasi Ekstra yang selalu memberi dukungan dan motivasi, serta pengetahuan dan banyak pengalaman yang berharga yang dapatku ambil dan yang berpengaruh sangat luar biasa untukku.

9. Dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan apa yang dibuatnya. Maka dari itu, saran, kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata penulis mohon maaf bila ada kesalahan.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Agustiana
1511010007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
F. Penelitian yang Relevan	15

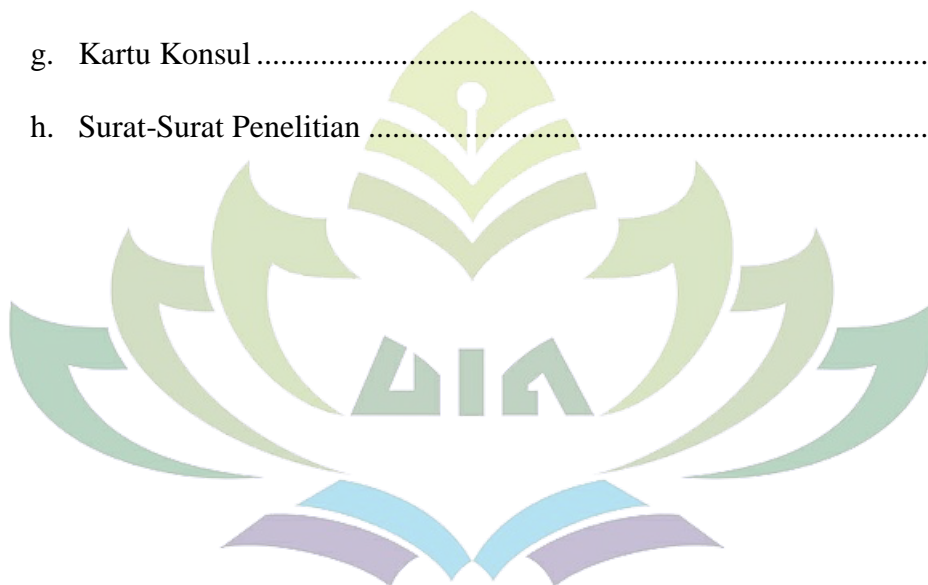
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Pengertian Waris Islam dan Hukum Nasional	17
1. Pengertian Waris Islam.....	17
2. Pengertian Waris dalam Hukum Nasional	18
B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan	21
1. Rukun Kewarisan	21
2. Syarat Kewarisan	22
3. Sebab Kewarisan.....	23
4. Penghalang Kewarisan	26
C. Ahli Waris, Harta Dzaw Al-Furudh dan Bagian-Bagiannya	29
1. Ahli Waris	29

2. Harta Waris dan Prioritas Penggunaanya	31
3. Dzaw Al-Furudh dan Bagian-Bagiannya Menurut Al-Qur'an	33
4. Bagian-Bagian Dzaw Al-Furudh Menurut Al-Qur'an	37
D. Hukum Adat Waris	51
1. Pengertian Hukum Adat Waris.....	51
2. Sistem Kewarisan.....	53
3. Sifat Hukum Waris Adat	56
4. Hak Waris dalam Adat Lampung Pepadun.....	58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	65
A. Jenis dan Lokasi Peneltian.....	65
B. Sumber Data	66
C. Metode Pengumpul Data dan Instrumen Penelitian	67
D. Analisa Data	71
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	76
A. Profil Pondok Pesantren Daarul Khair	76
1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Daarul Khair	76
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Daarul Khair	76
3. Tingkat Kependidikan dan Jumlah Santri Pondok Pesantren Daarul Khair.....	77
4. Kurikulum Pondok dan Tenaga Kependidikan Pesantren Daarul Khair.....	78
5. Ekstrakurikuler Santri dan Prestasi Santri Pondok Pesantren Daarul Khair.....	79
6. Fasilitas dan Aktifitas Santri Pondok Pesantren Daarul Khair	80
7. Tata Tertib Pondok Pesantren Daarul Khair	81

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan	84
C. Hasil Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan	86
D. Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Prespektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair	88
E. Analisis Prespektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Tentang Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun	91
F. Temuan Penelitian	94
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

a. Panduan Wawancara	103
b. Surat Keterangan Wawancara	104
c. Daftar Nama Informan	105
d. Panduan Wawancara	106
e. Dokumentasi	125
f. Pengesahan Seminar Proposal.....	129
g. Kartu Konsul	130
h. Surat-Surat Penelitian	131



DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah	77
4.2 Jumlah Madrasah Aliyah Al-Islamiyah	77
4.3 Waktu dan Aktifitas Santri.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan ini. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tidak dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Saat ini, masalah yang sering ditemukan dalam pembagian harta warisan adalah *aul*. *Aul* merupakan bahasa (etimologi) berarti mengangkat. Kata *aul* ini kadang-kadang cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Secara istilah *aul* adalah bertambahnya atau berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.

Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹

Menurut Fikri dan Wahidin dalam penelitiannya yang berjudul konsepsi hukum waris Islam dan hukum waris adat masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya

¹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3.

dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.² Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing.³

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴ Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁵ Termasuk didalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan.

Istilah waris didalam kelengkapan hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan

²Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 7.

³Fikri, Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*, (Surakarta: IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 197.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 13.

⁵Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 11.

dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat di masa lampau tentang hukum waris ada.

Ter Harr menyatakan:

*"... het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben of het boeiende, eeuwige process van doorgeven and overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie."*⁶

"... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Soepomo menyatakan:

"Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya".⁷

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak

⁶ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 7.

⁷ Soepomo, "*Bab-bab Tentang Hukum Adat*", (Penerbitan Universitas, 1967), h. 72.

berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bukanlah sebagaimana yang dikemukakan Wirjono.

Warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Perhatikan istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang, sedangkan kami mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Di Indonesia di antara orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda, yaitu pertama dalam bentuk masyarakat sistem *Patrilineal*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki) dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol atau kuat; kedua sistem *Matrilinea*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan) anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki; ketiga yaitu sistem *Bilateral/ Parental*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu, maka

kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.⁸

Masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya bermukim diwilayah Kota Alam provinsi Lampung dimulai dari Kabupaten Abung Tengah hingga Kotabumi Selatan. Di daerah tersebut juga terdapat sebuah pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi yang menjadi tempat santri-santri belajar agama. Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Istilah “pesantren” berasal dari kata pe-“santri”-an, dimana kata “santri” berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah “pondok” berasal dari bahasa Arab “funduuk” yang berarti penginapan.⁹ Pesantren menurut pengertian adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok adalah rumah atau tempat sederhana yang terbuat dari bambu. Pondok pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri secara umum merupakan sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren yang biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

Dalam pondok pesantren para santri mendapatkan ilmu agama dari guru atau kiai yang ada dalam pondok pesantren tersebut. Para santri mempelajari lebih dalam mengenai ilmu agama salah satunya yang membahas

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h, 310.

⁹ Imam Syafe’I, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, (Al Tazqiah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 8 No 1 2017)

mengenai pembagian waris menurut ajaran islam. Dalam ajaran islam sudah sangat jelas diatur mengenai hukum dan tata cara pembagian waris dalam Al-Quran. Dalam adat Lampung juga diatur hukum dan tata cara pembagian waris, dalam hal ini pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi. Dalam hal ini para santri dapat menganalisis antara hukum dan tata cara pembagian waris menurut islam dan menurut adat Lampung.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis mengenai pandangan santri terhadap pembagian harta warisan Adat Lampung. Langkah yang nyata yang dilakukan adalah terlebih dahulu mengetahui pembagian harta warisan menurut Adat Lampung di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan.

Pada masyarakat adat Lampung yang menggunakan bentuk perkawinan selarian dan mayoritas dengat perayaan adat yaitu begawi dan memakai sistem kewarisan *patrilineal*, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Hal inilah yang kadang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat Lampung yang mana keberadaan anak laki-laki yang dianggap sangat penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung berlaku sebuah

kebiasaan yang mana apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu laki-laki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat pra penelitian, peneliti mewawancarai salah satu tokoh adat, tentang pembagian harta warisan yang ada dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Kota Alam:¹⁰

- a. Harta warisan di bagikan ketika orang tua masih hidup. Dilakukan demikian karena, yang dikhawatirkan orang tua adalah adanya perselisihan atau pertengkaran antar anak satu dengan yang lain dan tidak ada kecemburuan sosial ketika orang tua sudah membagi dengan takaran masing-masing anak laki-laki maupun perempuan.
- b. Selain itu juga orang tua dan anak-anak berkumpul untuk memusyawarahkan masing-masing bagian mereka. Dengan pertimbangan, anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak dengan pertimbangan karena, anak laki-laki akan berkeluarga dan bertaanggung jawab penuh terhadap orang tuanya, adik-adiknya, istri dan anak-anaknya serta takaran untuk anak laki-laki tertua lebih banyak dari pada anak laki-laki yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan anak perempuan lebih sedikit dari anak laki-laki karena, pertimbangan anak perempuan akan ikut dengan suami dan sudah menjadi

¹⁰Wawancara bapak Idris pada tanggal 12 September 2018

hak dan kewajiban seorang suami. Serta anak perempuan tidak berhak atas hak asuh kedua orangtua serta adik-adik yang berada di bawahnya.

Pada pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun yang berada di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan bukan hanya terlihat dari pembagiannya saja melainkan ada beberapa prinsip kewarisan yaitu:

- a. Prinsip kewarisan adat Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan mempunyai beberapa prinsip yaitu:

- 1) Musyawarah untuk mufakat

Dalam tradisi yang berlaku di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan untuk sebagian masyarakat muslim tidak mengenal bagian waris tertentu (seperti setengah, seperempat, seperenam, dll) untuk masing-masing ahli waris. Namun ada masyarakat yang mengetahui bahwa sebenarnya pembagian harta waris menurut Islam bagiannya adalah dua banding satu.

Pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara ahli waris. Apabila dalam warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Warisan baru bisa dibagikan setelah tercapai kesepakatan bagian waris masing-masing ahli waris.

2) Memiliki hak yang berbeda

Memiliki hak yang berbeda yang dimaksud adalah bahwa ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan mendapatkan hak yang berbeda untuk mewarisi harta yang dimiliki oleh orangtuanya. Namun demikian tidak ada pembeda untuk anak laki-laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga atau belum. Tetapi takaran anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Karena anak laki-laki yang sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya lebih besar dari pada anak perempuan yang akan ikut suaminya. Jika anak laki-laki belum menikah maka harta warisan yang sudah dibagi itu belum menjadi milik sepenuhnya dikarenakan ia belum memiliki tanggungan. Beda halnya dengan anak laki-laki yang sudah berkeluarga, harta yang diserahkan sudah sepenuhnya menjadi hak atau miliknya, begitupun hak anak perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah yang jadi pembedanya adalah takaran atau pembagian hartanya saja.

Berdasarkan wawancara penulis di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan didapatkan keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pewarisan yang berlaku di Desa Kota Alam yaitu:

b. Sebab-sebab mewarisi

1) Hubungan Perkawinan

Hubungan Perkawinan dapat dijadikan sebagai sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan. Seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, maka diantara suami istri dapat masing-masing dapat mewarisi, apabila salah satu diantaranya meninggal dunia.

2) Hubungan kekerabatan

Hubungan darah adalah sebagai faktor utama ahli waris sebab nasab yang berhak menerimanya hanya anak. Untuk menentukan ahli waris sebab nasab, dibedakan menjadi kelompok/ golongan berdasarkan hubungan darah dengan yang memiliki harta warisan.

Anak perempuan mereka berhak mendapatkan harta warisan namun tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak. Namun, anak perempuanpun bertanggung jawab atas keluarganya dan mengurus adik-adiknya tapi tidak sepenuhnya. Tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sama saja, namun lebih diberatkan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki yang akan sepenuhnya meneruskan keturunan keluarga dan menjadi pengganti kedua orang tua.

Pada Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak maka mendapatkan

(1/8) bagian yang diterima (ahli waris). Apabila dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Jika dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai seorang suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya).¹¹

Seorang suami wajib menafkahi istri dan anaknya yang berada ditanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, begitu pula seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya secara lahir dan batin.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah proposal dalam judul: “Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Perspektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (Studi di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan)”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi lingkup pembahasan maka masalah yang akan dibahas dan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat sering terjadi didalam keluarga ketika pembagian harta warisan dilaksanakan.
2. Pembagian harta warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup.
3. Pembagian harta warisan tidak ada ketetapan.
4. Pembagian harta warisan anak laki-laki pertama berbeda dengan pembagian anak laki-laki kedua sampai dengan seterusnya.
5. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dan tidak berhak atas keberlangsungan hidup orang tua dan keluarganya.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 66.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti agar tidak terjadi adanya penyimpangan dalam penelitian, maka diberi pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi kepada permasalahan “Pembagian harta warisan menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, serta prespektif atau pandangan santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun”

D. Rumusan Masalah

Masalah ialah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada.¹² Rumusan masalah berbeda dengan masalah kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.¹³ Berdasarkan latar belakang dan beberapa pengertian tentang rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

¹² Marghono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 55.

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan?
2. Bagaimanakah prespektif atau pandangan santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut adat Lampung Pepadun di desa Kota Alam, kecamatan Kotabumi Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun.

2. Kegunaan

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis mengharapkan ini berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung. Serta mampu merubah pola pikiran yang harus mengikuti aturan adat tanpa harus merujuk kepada kebenaran pada Islam.

F. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian Aida Elfira Waway yang berjudul *“pembagian harta waris menurut sistem kewarisan hukum adat Lampung pepadun (studi pada masyarakat adat buai nunyai kecamatan Kotabumi)”* menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan pada permasalahannya pada sistem kewarisan hukum adat di Kecamatan Kotabumi. Hasil penelitian ini adalah: Pembagian harta waris di masyarakat adat buai nunyai dalam pelaksanaannya masih kurang. Mereka melaksanakan pembagian harta warisan tidak menurut al-quran dan hadis, melainkan mengikuti sistem pemangku adat.
2. Hasil penelitian Kusnadi yang berjudul *“pembagian harta waris adat Lampung Sai Batin kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum Islam”* menunjukkan bahwa pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.¹⁴ Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki,

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1978), h. 34.

maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.¹⁵



¹⁵ Kusnadi, *Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam*, (Pringsewu: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 2, Mei 2017).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Waris Islam dan Pengertian Hukum Waris Nasional

1. Pengertian Waris Islam

Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*Infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.

Warisan adalah berbagai aturan perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia ke pada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang *aeniyah* atau *syahshiyah*. Utang-piutang

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013), h. 32.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 13.

aeniyah adalah utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang *syahshiyah* adalah utang-piutang yang berkaitan dengan kredit, seperti *qiradh*, mahar, dan lain-lain.³

2. Pengertian Waris dalam Hukum Waris Nasional

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan di Indonesia* mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal bagaimanakan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴

Dengan demikian, menurut Prodjodikoro, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erfegenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.

³Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, (1995), h. 41.

⁴*Ibid*, h. 13.

3. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Unsur pertama mempersoalkan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan. Unsur kedua mempersoalkan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan samapai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, pada saat si peninggal warisan dan si ahli waris berada bersama-sama.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia ada hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.⁵
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 84.

3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek*.

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem *parental* atau *ouderrechtelijk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan waris dalam sistem kewarisan Islam adalah segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun *tirkah* atau harta peninggalan adalah segala bentuk harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ditinggalkan oleh mayat, dan segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab mayat yang dibebankan kepada ahli warisnya, seperti utang-piutang dan wasiat.

B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan

1. Rukun Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:⁶

- a. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris. Seperti didalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷

Kematian para pewaris menurut para ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
2. Mati *huqmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

- b. *Ahli waris*, yaitu mereka yang berhak menerima harta

⁶*Ibid.* h. 129.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 21.

peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala*.

- c. *Harta warisan*, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

2. Syarat Kewarisan

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:⁸

Pertama, Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memponisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *warits* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika

⁸*Ibid.*h. 132.

pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Ketiga, Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahli furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapat warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.⁹

3. Sebab Kewarisan

Seseorang dapat dikategorikan sebagai penerima warisan atau ahli waris karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi penerima warisan dari sang pewaris. Adapun

⁹Ash-Shabuni. Umu Basalamah, *Op. Cit.*

beberapa sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

Pertama, Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Dalam hal ini adalah diperuntukkan kepada kerabat dekat, sanak family dari keluarga pewaris itu sendiri. Seperti dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.”¹⁰

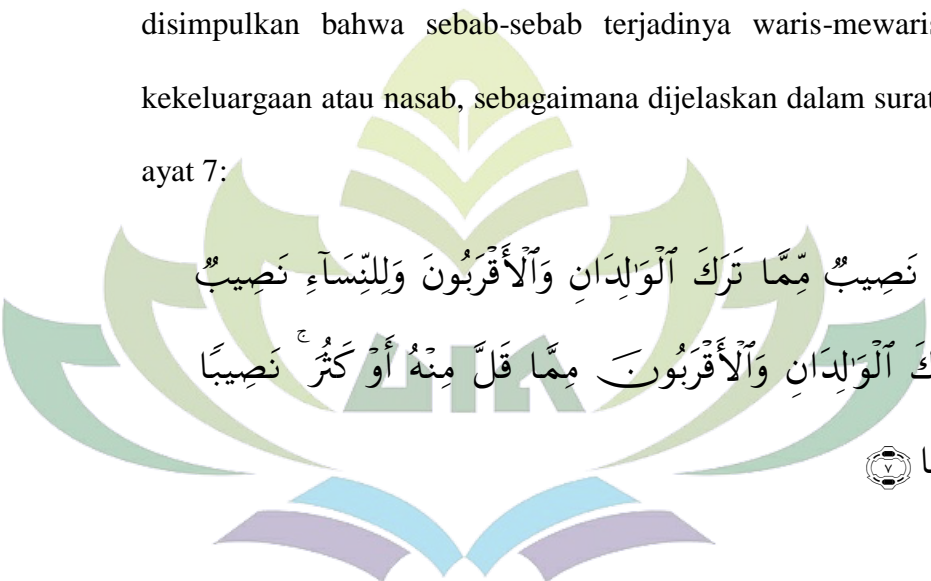
Kedua, pernikahan yaitu terjadi akad nikah secara legal (syar’i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.¹¹

Ketiga, *al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al ‘itqi* dan *wala an-ni’mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 149.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 348.

kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqa*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. menganugrahkan kepadanya hak mewarisi kepada budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.¹² Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi adalah kekeluargaan atau nasab, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7:



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*¹³

4. Penghalang Kewarisan

¹² Ash- Shabuni (1995), *Op. Cit.*, h. 47.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.¹⁴

a. Perbedaan Agama

Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama madzhab sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non Muslim? Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia adalah orang muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Pindah Agama dapat mencegah pula seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari waris dengan syarat-syarat tertentu.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan Ijma para Ulama, Murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyyah murtad ada dua jenis yaitu:

¹⁴*Ibid*, h. 112.

1. Murtad fitrah, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian ia murtad dari Agama Islam.
2. Murtad Millah, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kemudian kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.

b. Karena Membunuh

Seluruh ulama bersepakat bahwa pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah/2:72).

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ^طوَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Dan (Ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan”.¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 10.

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang telah direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam.

c. Sebab Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung juga dimiliki oleh tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (Budak murni), mudabbar (Budak yang dikatakan merdeka jika tuannya meninggal dunia), atau mukatab (Budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak

mempunyai hak milik. Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk memedekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan satu sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, “Jika isteriku melahirkan anak laki-laki, maka engkau merdeka”.

C. Ahli Waris, Harta, *Dzaw Al-Furudh* dan Bagian-bagiannya

1. Ahli Waris

Secara garis besar, dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada tiga macam, yaitu:¹⁶

1. Ahli waris laki-laki ada sepuluh orang, yaitu: (a) Anak laki-laki, (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, (c) Ayah, (d) Kakek (nenek laki-laki), (e) Saudara laki-laki, (f) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, (g) Anak laki-laki paman, (h) Suami, (i) *Maula* (orang yang telah memerdekakan si mayit).
2. Ahli waris perempuan ada tujuh orang, yaitu: (a) Anak perempuan, (b) Cucu perempuan dari anak perempuan, (c) Ibu, (d) Nenek perempuan, (e) Saudara perempuan, (f) Istri, (g) Perempuan yang telah memerdekakan si mayat.
3. Ahli waris dalam keadaan bercampur (laki-laki dan perempuan)

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 121.

adakalanya tidak bercampur. Waris yang tidak bercampur, dari laki-laki ada dua jalan, yaitu waris jalan pendek dan waris jalan panjang.

- a. Dari jalan panjang, ahli waris laki-laki adalah:¹⁷ (a) Anak laki-laki, (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, (c) Ayah, (d) Kakek, (e) Saudara laki-laki sekandung, (f) Saudara laki-laki seayah, (g) Saudara laki-laki seibu, (h) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (i) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan paman (saudara laki-laki dari ayah yang sekandung), (j) Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah), (k) Anak laki-laki paman (saudara laki-laki dari ayah yang sekandung), (l) Anak laki-laki paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah), (m) Suami, (n) Laki-laki yang telah memerdekakan si mayit.

Jika semua itu ada, ahli waris yang mendapatkan bagian hanya tiga orang, yaitu (1) ayah; (2) anak laki-laki; dan (3) suami.

- b. Ahli waris perempuan menurut jalan panjang adalah:¹⁸ (a) Anak perempuan, (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, (c) Ibu, (d) Nenek dari ayah, (e) Nenek dari ibu, (f) Saudara perempuan seayah, (g) Saudara perempuan seibu, (h) Istri, (i) Perempuan yang telah memerdekakan si mayit.

Apabila semuanya ada, yang mendapat waris hanya lima orang,

¹⁷ *Ibid*, h. 122.

¹⁸ Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 73.

yaitu: (1) Istri; (2) Anak perempuan; (3) Cucu perempuan dari anak laki-laki; (4) Ibu; (5) Saudara perempuan sekandung.

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan ada semua, yang mendapat bagian adalah: (1) Orang tua (ayah-ibu); (2) Anak laki-laki; (3) Anak perempuan; (4) Suami/istri

4. Ahli waris yang tidak putus karena keadaan, ada lima yaitu: (1). Suami, (2) Istri, (3) Ayah, (4) Ibu, (5) Anak.

2. Harta Waris dan Prioritas Penggunaannya

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang haram dan yang halal diambil untuk dinikmati. Diantara harta yang halal diambil adalah harta pusaka atau harta waris. Didalam Al-Quran dan Al-Hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Allah SWT. Berfirman Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ...

Artinya:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ”*¹⁹

Dalam harta waris terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 188.

oleh ahli waris atau untuk ahli waris sendiri. *Pertama*, hak yang bersangkutan dengan harta adalah zakat dan sewanya. Hak ini hendaknya diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagikan kepada ahli waris. *Kedua*, biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Sesudah hak yang pertama diselesaikan, sisanya barulah dipergunakan untuk biaya mengurus mayat. *Ketiga*, harta mayat berkaitan pula dengan kewajiban utang piutang sewaktu dia masih hidup. Hendaknya dibayar sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. *Keempat*, menunaikan wasiat mayat sebelum meninggal dunia. Jika si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaknya dibayar dari jumlah harta peninggalannya, wasiat itu hendaknya dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya:

“Pembagian harta waris itu dilakukan setelah menunaikan wasiat si mayat (dan) sesudah dibayar utangnya”²⁰

Harta waris yang disebut dengan harta pusaka atau tirkah, peninggalan si mayat, bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang tidak bergerak, sebagaimana kebanyakan mengetahui harta waris yang

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

berupa tanah pertanian, perkebunan, uang kontan, deposito, tabungan, dan sejenisnya, atau yang berupa kendaraan dan hewan ternak. Harta waris dapat pula berupa utang ahli waris yang pembebannya diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris tidak dibenarkan membagikan harta waris sebelum ia membayar utang si mayat.

3. *Dzaw Al-Furudh* dan Bagian-bagiannya Menurut Al-Qur'an

a. *Dzaw Al-Furudh* dalam Al-Quran

Golongan *dzawil furudh* adalah golongan keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kalangann *fuqaha* sependapat bahwa *dzawil furudh* secara mutlak telah jelas bagian-bagiannya. Mengenai bagian-bagian yang telah dipastikan, yang *pertama* berkaitan dengan kelompok *Ashabah Al-Furudh*, yaitu kelompok pertama diberi bagian harta warisan. Mereka orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. *Kedua*, *ashabah al-nasabiyah*, yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Jika tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya, anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya. Penambahan bagi *ashhabul furudh* sesuai bagian (kecuali suami-istri). Apabila harta

warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, hendaknya diberikan kepada *ashabul furudh* masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada. Sebab, hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya. Yang dimaksud kerabat adalah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim dan tidak termasuk *ashabul furudh* dan juga *'ashabah*. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Bila pewaris tidak punya kerabat sebagai *ashabul furudh*, tidak pula *'ashabah*, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.

Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk *ashabul furudh* dan *'ashabah*, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan Rahim, harta warisan seluruhnya menjadi milik suami atau istri. Misalnya, seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya

merupakan tambahan hak warisnya. Dengan demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga, sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.

Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud disini adalah orang lain, artinya bukan salah seorang dari ahli waris. Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal, ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang yang bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian. Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris atau kerabat, seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* untuk kemaslahatan umum. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَّأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu”.²¹
 Untuk mengetahui bagian *ashhab al- furudh*, dapat ditempuh memakai dua jalan:²²

1. *Jalan tadally*, yaitu mengetahui bagian *furudh* (bagian waris yang telah ditentukan) dengan menghitung seperdua dari seperdua, yaitu seperempat, dan seperdua dari seperempat, yaitu seperdelapan. Seperdua dari dua per tiga yaitu sepertiga dan seperdua dari sepertiga yaitu seperenam.
2. *Jalan taraqy*, yaitu mengetahui bagian *furudh* dengan menghitung kelipatan. Kelipatan dari seperdelapan adalah seperempat dan kelipatan dari seperempat adalah setengah. Kelipatan dari seperenam adalah sepertiga dan kelipatan dari sepertiga adalah dua per tiga.

Kerabat dalam hukum waris Islam dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu:

1. *Leluhur perempuan* adalah perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas.
2. *Leluhur laki-laki* adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak ke atas.
3. *Keturunan perempuan* adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan anak laki-laki. Itu adalah anak

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 66.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 137.

perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.

4. *Keturunan laki-laki* adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan, seberapa pun rendahnya). Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
5. *Saudara seibu* adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
6. *Saudara sekandung/sebapak* adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
7. *Kerabat lainnya*, yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok di atas.²³

4. Bagian-Bagian *Dzaw Al-Furudh* Menurut Al-Quran

Ketentuan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh Al-Quran (*farudh al-muqaddarah*) adalah sebagai berikut.²⁴

1. Ahli Waris yang Mendapat 1/2 Harta Waris

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima orang.

²³ *Ibid*, 138.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 141.

Seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan:

- a. Suami
- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Saudara perempuan sekandung
- e. Saudara perempuan seayah

Masing-masing ahli waris tersebut di atas diikat oleh syarat-syarat berikut.

- a. Seorang suami mendapatkan harta warisan seperdua dengan satu syarat, yaitu apabila *muwaris* (dalam hal ini istri yang meninggal dunia) tidak mempunyai ahli waris *bunuriyah* (anak dan turunannya terus ke bawah), baik dari suami tersebut atau dari suami yang lain.

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

...وَلَدَّ لَهُنَّ ۖ وَلَدٌ لَّهُنَّ يَكُنْ لِّمَنْ أَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفْتُ لَكُمْ...

Artinya:

*“Bagi kalian (para suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, apabila istri-istri kalian tidak meninggalkan anak”*²⁵

- b. Seorang anak perempuan mendapat bagian setengah dengan dua syarat, yaitu (1) tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang mendapat *ashabah*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan itu harus anak tunggal. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

Nisa ayat 11:

ط
...الْيَصِفُ فَلَهَا وَحِدةٌ كَانَتْوَإِنْ...

Artinya:

*“Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian”*²⁶

Alasan seorang anak perempuan tidak dapat bagian seperdua bila ada *mu'ashib* (golongan *ashabah* yaitu anak laki-laki), karena jika anak perempuan mendapatkan setengah, bagian anak laki-laki akan sama besarnya dengan bagian anak perempuan, atau suatu saat bagian anak perempuan akan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal ini tidak diakui oleh syariat Islam.²⁷ Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperdua dengan tiga syarat, yaitu (a) cucu perempuan itu tidak bersama dengan saudaranya yang mendapatkan *ashabah*, yaitu cucu laki-laki dari anak laki, (b) cucu perempuan itu hanya seorang diri, (c) harus tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki sekandung.

Alasan kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki, berdasarkan dalil kewarisan anak perempuan itu sendiri, karena cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menempati kedudukan anak perempuan, jika anak perempuan itu tidak ada. Dikatakan dalam syair bahwa anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki serta anak

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

²⁷ Sulaiman Rasijo, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), h. 349

perempuan kita (adalah keturunan kita) dan cucu-cucu dari anak perempuan kita adalah keturunan orang lain. Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ...

Artinya:

*“Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian”*²⁸

Saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah dengan empat syarat, yaitu (a) tidak mewarisi dengan saudara yang mendapatkan ashabah, yaitu saudara laki-laki seayah, (b) seorang diri, (c) pewaris tidak mempunyai orang tua dan anak keturunan, (d) pewaris tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.²⁹

Dasar kewarisan saudara perempuan seayah sama dengan dasar kewarisan saudara perempuan sekandung, menurut ijma'. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan “Jika orang yang mati itu meninggalkan saudara perempuan, saudara perempuan itu mendapatkan bagian seperdua.” Kata ‘*ukhtun*’ di sini meliputi saudara perempuan sekandung dan seayah. Adapun saudara perempuan seibu, selamanya tidak dapat mewarisi seperdua, ia hanya dapat mewarisi seperenam.

2. Ahli Waris yang Mendapat 1/4 Harta Waris

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

²⁹ *Ibid*, 349.

- a. *Suami*, apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau perempuan; atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ ...

Artinya :

*"Mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya"*³⁰

- b. *Istri*, baik hanya satu orang ataupun lebih, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Apabila istri itu lebih dari satu, seperempat itu dibagi rata antara mereka. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

... وَلَكُمْ يَكُنْ لِمَنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ ...

Artinya:

*"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak "*³¹

3. Ahli Waris yang Mendapat 1/8 Harta Waris

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

Harta waris yang mendapat seperdelapan $\frac{1}{8}$ harta waris, yaitu istri, baik satu atau lebih, jika suaminya meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ...

Artinya:

“Jika kamu mempunyai anak, para istri itu memperoleh seperdelapandari harta yang kamu tinggalkan”.³²

4. Ahli Waris yang Mendapat $\frac{2}{3}$ Harta Waris

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan anak laki-laki tidak ada, mereka mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan ayahnya. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

... تَرَكَ مَا ثُلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ ...

Artinya:

... “Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga dari harga yang ditinggalkan”...³³

- b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

yang berbilang itu, mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari harta. Hal itu beralasan pada analogy, yaitu dianalogikan kepada anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.

- c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih). Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa 176:

....تَرَكَ مِمَّا أَلْتُنَّانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَاتَا فَإِنْ...

Artinya:

“Jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”³⁴

Yang dimaksud dengan dua orang yang disebut dalam ayat itu adalah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadis dari Jabir yang berkata, “Saya telah mengadukan hal saya kepada Rasulullah SAW. karena saya mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Dalam surat An-Nisa ayat 176, yang dimaksud dengan saudara seibu seapak atau saudara seapak saja apabila saudara perempuan yang seibu seapak tidak ada.

5. Ahli Waris yang Mendapat 1/3 Harta Waris

- a. *Seorang ibu* berhak mendapatkan bagian sepertiga, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 84.

sekandung atau seayah atau seibu. Firman Allah SWT dalam surat

An-Nisa ayat 11:

... فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

Artinya:

...“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga”...³⁵

b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki

maupun perempuan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 12:

...الْثُلُثُ فِي شَرَكَاءَ فَهُمْ ذَٰلِكَ مِنْ أَكْثَرِكَائِمْ فَإِنْ ...

Artinya:

...“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”...³⁶

Yang dimaksud dengan kata *fahum syuraka-u fi al-tsuluts*

(mereka bersekutu dalam yang sepertiga). Kata ‘bersekutu’

menunjukkan kebersamaan, yakni mereka harus membagi sama rata di

antara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa membedakan

bahwa laki-laki harus memperoleh bagian yang lebih besar dari pada

perempuan. Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan

seibu bila telah memenuhi syarat-syarat diatas ialah sepertiga, dan

pembagiannya sama rata, baik yang laki-laki maupun perempuan.

Pembagian mereka berbeda dengan bagian para saudara laki-laki atau

perempuan kandung dan seayah, yang dalam hal ini bagian saudara

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

laki-laki dua kali lipat bagian saudara perempuan.

6. Ahli Waris yang Mendapat 1/6 Harta Waris

- a. Ayah mendapatkan bagian seperenam bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT.

Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

... وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...

Artinya:

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”³⁷

- b. Kakek sah (ayahnya ayah) dan terus keatas mendapat seperenam apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang meninggal). Dengan demikian, status kakek dapat menempati kedudukan ayah, apabila ayah telah tiada, kecuali dalam tiga masalah: *Pertama*, saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara seayah tidak dapat menerima waris bersama dengan ayah (termasuk ijma). Namun, apabila dengan kakek, (menurut Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad), mereka mendapat waris. Menurut Abu Hanifah mereka (saudara-saudara) tetap tidak boleh mendapat waris walaupun bersama kakek, sebagaimana saudara-saudara bersama ayah, karena dalam bidang

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

ashabah, jihat ubuwah (arah bapak atau kebapakan atau turun keatas) didahulukan daripada *jihat ukhuwah* (arah saudara atau persaudaraan atau hubungan kesamping). *Kedua*, dalam masalah *gharawain*, yaitu jika seorang perempuan mati meninggalkan suami, ayah, dan ibu, ibu mendapatkan bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila kedudukan ayah ditempati oleh kakek (karena ayah telah terlebih dahulu mati), ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta, menurut ijma. *Ketiga*, dalam masalah *gharawain*, yakni seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, dan ibu maka ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila kedudukan ayah diganti oleh kakek (ayah terlebih dahulu mati), ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta, menurut ijma.

- c. Ibu mengambil bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat: *Pertama*, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. *Kedua*, bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...

Artinya:

*“Apabila orang yang meninggal itu mempunyai saudara-saudara, maka ibu mendapatkan bagian seperenam”*³⁸

- d. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapatkan bagian seperenam apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan mendapat bagian setengah, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam, sebagai pelengkap dua per tiga.
- e. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam sebagai penyempurna dari dua per tiga. Sebab, ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah bagian, maka tidak ada sisa, kecuali seperenam yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.
- f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 62.

masing-masing seperenam bila mewarisi sendirian. Allah SWT.

Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:

... وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ...

Artinya:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masingdari kedua jenis saudara itu seperenam harta”³⁹

Dan persyaratannya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

- g. Nenek sah memperoleh bagian seperenam ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan ini berlaku, baik nenek hanya satu atau lebih (dari jalur ayah maupun ibu), seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka.

Ashhab al- furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris.

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah:

1. Leluhur perempuan: ibu dan nenek
2. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
3. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 63.

pancar laki-laki

4. Saudara sekandung: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu
5. Saudara sekandung/ seapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.

Orang yang berhak mendapat bagian seperdelapan hanya bagi seorang atau beberapa orang istri apabila suami (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya, baik keturunan itu dari istri tersebut atau dari istri yang lain.

Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, mendapat bagian dua per tiga dengan syarat: (a) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, (b) tidak bersama dengan dua orang anak perempuan, (c) tidak ada *mu'ashib* (yang mendapat *ashabah*), yaitu cucu laki-laki dari anak dari anak laki-laki yang satu derajat dengan mereka.

Begitu juga, hukum waris cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah (asal dihubungkan oleh keturunan laki-laki). Hanya saja, cucu terhalang untuk mendapatkan waris apabila terdapat anak laki-laki. Kaidah mengatakan “*Barang siapa yang dikaitkan dengan*

suatu perantara, ia akan terhibab dengan adanya orang yang menjadi perantara itu.”

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mewarisi dua per tiga dengan syarat: (a) tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada ayah atau kakek terus keatas, yaitu pewaris tidak mempunyai orang tua dan keturunan, (b) tidak mempunyai saudara *mu'ashib* (golongan ashabah), yakni saudara laki-laki sekandung, (c) tidak ada anak perempuan atau perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih. Andai kata ada anak perempuan seorang, dua orang cucu meskipun mendapat waris dua per tiga, tetapi masih sebagian, yakni seperenam. Akan tetapi, apabila ada dua orang perempuan, dua orang cucu sama sekali tidak mendapat warisan. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih mendapat warisan dua per tiga dengan syarat:

1. Tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek (orang tua atau keturunan).
2. Tidak mempunyai saudara *mu'ashib*, yaitu saudara laki-laki seayah.
3. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung.

D. Hukum Adat Waris

1. Pengertian Hukum Adat Waris

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemiliknnya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴⁰ Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴¹

Ter harr mengemukakan bahwa, hukum adat waris adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Worjono Prodjodikoro merumuskan hukum waris adat adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 1.

tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Soepomo mengatakan hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang tidak terwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu telah dimulai dari waktu orang tua masih hidup.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum waris adat dapat dikemukakan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan (harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari si pewaris pada waktu ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada para ahli waris).

Unsur-unsur hukum waris adat adalah sebagai berikut:

1. Pewaris, sebagai subjek hukum waris, yaitu seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris.
2. Ahli waris, subjek hukum waris, yaitu seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.
3. Harta atau warisan, objek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Proses penerusan harta benda, yaitu suatu penerusan dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia. Proses ini berkaitan dengan

pelaksanaan proses pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

2. Sistem Kewarisan

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.

1. Dalam bentuk masyarakat sistem *Patrilineal*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol atau kuat;
2. Sistem *Matrilinea*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan) anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki;
3. Sistem *Bilateral/Parental*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu, maka kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.

Hazairin menyatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan

bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau birateral.⁴² Hukum waris adat mengenal 3 sistem kewarisan sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Ciriya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewaris kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.
2. Sistem kewarisan individual, sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan diantara ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya diwarisi oleh seorang anak. Ciriya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja.

Sistem mayorat ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

⁴²*Ibid*, h. 24.

a. Mayorat laki-laki (pria), yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Di Lampung semua harta peninggalan dikuasai oleh laki-laki tertua yang disebut anak penimbang.

b. Sistem kewarisan mayorat, yaitu apabila anak tertua atau bungsu (terkecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.

Ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mayorat perempuan tertua, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris (Tanah Semendo, Sumatra Selatan). Di Tanah Semendo di Sumatra Selatan, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan tertua yang disebut *tunggal tubing* (penunggu harta) yang didampingi oleh *payang jurai*, sebagai mayorat wanita.

2. Mayorat anak perempuan bungsu, yaitu apabila anak perempuan menjadi ahli waris dari si pewaris, ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

Bahwa sistem kewarisan sebagaimana dikemukakan terdapat pendapat (1) bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial masyarakat setempat, (2) sistem

pewarisan tidak ada keterkaitan sistem pewarisan adat itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan.

Sistem kewarisan kolektif terdapat harta warisan itu tidak dapat terbagi-bagi. Secara umum di beberapa lingkungan hukum adat, harta waris itu tidak dapat dibagi-bagi disebabkan karena menurut sifatnya harta warisan itu tidak dapat dibagi-bagi secara individual.

3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional Indonesia, yakni bersendikan atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran yang dijiwai sifat komunal (kebersamaan), kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan.⁴³

Beberapa prinsip-prinsip hukum yang mendasari hukum adat waris adalah sebagai berikut:

1. Menurut sistem hukum adat, harta warisan bukanlah sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang tetapi merupakan kesatuan yang tak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis dan macamnya serta berdasarkan kepentingan para pewaris.
2. Menurut sistem hukum adat, pewaris didasarkan pada persamaan hak, artinya hak masing-masing para pewaris diperlukan sama dalam

⁴³Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 306.

proses meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan, dan diletakkan atas dasar kerukunan pada proses pembagiannya. Jadi hukum waris adat tidak mengenal *legime fortie* seperti hukum perdata BW. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu”.⁴⁴

3. Hukum waris adat menganut prinsip terbukanya warisan dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Jadi, hukum waris adat tidak mengenal adanya sewaktu-waktu para ahli waris menuntut terbukanya warisan.
4. Dalam penyelesaian warisan menggunakan asas hukum ketuhanan, pengendalian diri, musyawarah dan mufakat, kerukunan dan kekeluargaan, serta kebersamaan hak.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 66.

⁴⁵ *Ibid*, h. 307.

4. Hak Waris dalam Adat Lampung Pepadun

Nama “pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (juluk adok) dilakukan disinggasana ini. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pendalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikut garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari penyimbang dan seperti itu seterusnya.

Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan dari garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status

sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.⁴⁶

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak laki-laki dan anak perempuan, yang kedudukan masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah warisan.

1. Anak Kandung

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

⁴⁶Ardee, “Masyarakat Adat Lampung Peepadun”, diakses dari <https://www.indonesiakaya.com>, pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 19.56.

2. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan. Didalam lingkungan masyarakat Lampung Pepadun apabila didalam perkawinan. Dimana suami telah mempunyai anak laki-laki dan perempuan sedangkan istri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak pula dikaruniai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suami menjadi tegak tegi dari keturunan istri dengan suaminya yang telah wafat. Dimana istri yang kematian suami dikawin oleh kakak atau adik dari suami yang wafat. Anak lelaki suami yang nyemalang jika dijadikan tegak tegi dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan istri dan harta pencarian suami istri pertama. Sebaiknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai istri tetapi tidak mendapat keturunan dengan istri kedua yang telah mempunyai anak tetapi tidak pula perkawinan mereka dikaruniai anak. Dalam hal ini bisa terjadi salah satu anak bawaan dari istri kedua diangkat menjadi anak tiri menjadi waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan atau penguatan anak (Lampung) dari bapak dan ibu tiri bersangkutan.

3. Anak Laki-laki

Anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat. Seperti disebutkan dalam Al Qur'an surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*⁴⁷

Sebab itu maka wanita yang shaleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka. Kemudian jika mereka menaati mu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponogoro: Jakarta, 2015), h. 68.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34).

4. Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal, dimana bentuk perkawinan semenda yang berlaku dan suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan istri atau tidak termasuk kekerabatan istri seperti berlaku di Minangkabau. Di Minangkabau sebagai waris adalah anak wanita, demikian pula di daerah Semendo Sumatera Selatan atau dilingkungan masyarakat adat Lampung peminggir. Hanya di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak wanitanya sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya, di daerah Semendo ayah ibu mewarisi hanya pada anak-anak wanitanya. Apabila pewaris tidak mempunyai anak wanita tetapi hanya mempunyai anak-anak pria saja, sebagaimana berlaku di daerah Semendo maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita sebagai istrinya dalam bentuk perkawinan semendo ngangkit. Mirip serupa ini terdapat pula diperbatasan Minangkabau dan Mandaling dimana anak lelaki Minang melakukan perkawinan jujur dengan wanita Mandaling, sehingga dengan demikian si wanita dapat meneruskan kedudukan sebagai waris dari

orang tuanya. Seperti halnya dapat terjadi penyimpangan dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak wanita, demikian pula dalam kekerabatan matrilineal terjadi dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak lelaki oleh pewaris ibu atau oleh pewaris ayah kepada anak perempuannya bukan pada kemenakan di Minangkabau. Dalam kaitan pengelolaan harta, syariat Islam mengatur pula tata cara dan ketentuan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang disebut Hukum Waris. Pembagian harta pusaka bagi ahli Waris laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan azas keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, bukan atas dasar kesamaan status kekerabatan, berbeda halnya pembagian hak dan kedudukan wanita dalam Hukum Perdata Barat mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Sistem kewarisan diatur dan ditetapkan dalam ajaran Islam untuk melindungi keluarga dari perselisihan dan perpecahan serta menjamin hak-hak anggota keluarga atas harta yang ditinggalkan.

5. Anak Angkat

Dalam hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih

terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewaris bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup. Se jauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1). Tidak mempunyai keturunan.
- 2). Tidak ada penerus keturunan.
- 3). Hubungan baik dan tali persaudaraan.
- 4). Menurut adat setempat.
- 5). Kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, didalam perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepada keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah field research kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung data sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di atas data yang tampak.¹ Penelitian ini menggunakan kata-kata dan rangkaian kalimat, bukan merupakan deretan angka atau statistik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan perspektif atau pandangan santri terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun, di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi dan di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini,

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 207.

informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.² Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor kontekstual. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data, dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini akan bervariasi dari situasi satu kesituasi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan sumber data untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber utamanya, dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya adalah santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi.

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari subjek ataupun objek secara langsung, akan tetapi pihak lain seperti lembaga-lembaga terkait dan buku-buku yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, serta seluruh narasumber pendukung dalam

²Moleong J.Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011),h. 157.

penelitian ini. Informan penelitian ini adalah santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi.

C. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.³ Berdasarkan pendapat ini, akan dipaparkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode wawancara adalah "teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai".⁴ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

³*Ibid*, h. 309.

⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Menyusun Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 105.

⁵Lexi J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 186.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶

Dari jenis interview di atas, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, artinya bahwa penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang interview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis

⁶ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 194-197.

menggunakan cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan adanya kekakuan antara penulis sebagai penginterview dengan orang yang di interview. Dalam pelaksanaannya penulis akan mewawancarai santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi, untuk mendapatkan data tentang pandangan atau prespektif santri terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun, serta pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun di, desa Kota Alam, kecamatan Kotabumi Selatan.

b. Observasi

Observasi adalah "teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku obyek sasaran."⁷ Metode observasi ini merupakan metode pendukung dalam penelitian ini, karena dengan metode observasi penulis bisa mendapatkan informasi secara langsung dan juga memperoleh data secara lebih rinci dan jelas. observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu bentuk observasi atau pengamatan, dimana peneliti tidak terlibat langsung atau tidak berperan secara langsung ke dalam kegiatan yang diteliti. Metode ini penulis gunakan untuk melihat bagaimana pandangan atau prespektif santri

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Op.Cit.* h. 104.

pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun, serta bagaimana pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun, di desa Kota Alam, kecamatan Kotabumi Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸

Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang di peroleh. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis tentang pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun Prespektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (stadi di desa Kota Alam kecamatan Kotabumi Selatan).

2. Instrumen Penelitian

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Metode wawancara adalah "teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai”.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur karena responden bebas untuk mengungkapkan terkait masalah dalam penelitian ini. Wawancara di dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan atau prespektif santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi terhadap pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun serta pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun, di desa Kota Alam, kecamatan Kotabumi Selatan.

D. Analisa Data

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Sebagaimana pendapat berikut:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁰ Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, terlebih dahulu diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹¹

Jadi reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan tema-tema, konsep-konsep dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai data-data, baik gambaran mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan. Reduksi data merupakan proses berpikir

⁹Sugiyono, *Op. Cit.* h. 334.

¹⁰Ibid, h. 335.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 335.

sintesis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.¹²

Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini akan dianalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu semua data-data lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara, dokumen hasil observasi, dan lain sebagainya, akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang pembagian harta warisan.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay kan data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹³

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93.

¹³*Ibid*, h. 95.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Milles Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁴ Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir. Dalam pengolahan data yang diolah adalah hal-hal yang tercantum dan terekam dalam catatan lapangan hasil wawancara atau pengamatan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini termasuk penelitian

¹⁴*Ibid*, h. 99.

¹⁵Sugiyono, *Op. Cit.*h. 345.

kualitatif, jadi data yang dihasilkan berupa kata-kata, kalimat, gambar atau simbol.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik sama.¹⁶

¹⁶*Ibid*, h. 330.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Daarul Khair

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Daarul Khair

Pondok pesantren Daarul Khair berdiri pada tanggal 11 Dzulhijjah 1411 H yang bertempat pada tanggal 26 Juni 1991 M. Pondok pesantren ini merupakan satu lembaga pendidikan Islam Modern yang bercirikan Madrasah Mu'alimin Al-Islamiyah dengan lama pendidikan 6 (enam) tahun, 3 tahun tingkat Madrasah Tsanawiyah dan 3 tahun tingkat Madrasah Aliyah, yang berupaya tampil menjadi lembaga yang mempersiapkan generasi muda Islam religious dan bersikap Islami sebagai jawaban terhadap tantangan zaman. Upaya pembinaan dan penataan tersebut terus dikembangkan dalam berbagai substansi, diantaranya penerapan sistem terpadu antara modern dan klasik, dengan harapan dapat melahirkan Ulama yang berwawasan global serta mampu mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya secara komperhensif ditengah-tengah masyarakat.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Daarul Khair

Visi: Sumber ilmu pengetahuan dengan tetap berjiwa pondok dan melahirkan kader-kader pemimpin umat yang berakhlakul karimah serta konsekuen terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam.

Misi: mendidik dan mengembangkan generasi Islam yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikir bebas dan kemasyarakatan serta mentransfortasikan pengetahuan agama dan umum menuju terbentuknya ulama yang berwawasan luas.

3. Tingkat Kependidikan dan Jumlah Santri Pondok Pesantren Daarul Khair

Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah (Akreditasi B)

4.1

Jumlah santri Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah Pondok Pesantren Daarul Khair

KELAS	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
VII	17	22	39
VIII	13	23	36
IX	21	12	33
TOTAL	51	57	108

Madrasah Aliyah Al-Islamiyah (Akreditasi B)

4.2

Jumlah santri Madrasah Aliyah Al-Islamiyah Pondok Pesantren Daarul Khair

KELAS	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	16	23	39
11	12	19	31
12	7	23	30
TOTAL	35	65	100

4. Kurikulum Pondok dan Tenaga Kependidikan Pesantren Daarul Khair

a. Kurikulum Pondok

Mendukung kurikulum pondok pesantren Modern, pesantren Salafiyah, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional. Bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi sehari-hari yang merupakan salah satu upaya memahami Ilmu Pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikuler.

b. Tenaga Kependidikan

Diasuh oleh tenaga pendidik lulusan pondok pesantren, perguruan tinggi Agama dan Umum baik dalam maupun luar Negeri, dengan berjumlah 42 orang, antara lain:

- Alumni Pondok Pesantren Daarul Khair, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Daar-El Qolam Gintung, Pondok Pesantren Al-Falah Jawa Timur, Pondok Pesantren Darul Lughoh Wad Da'wah Bangil, Pondok Pesantren Turus Paneglang dan Pondok Pesantren Bambu Runcing Temanggung.
- Alumni Perguruan Tinggi Negeri: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UHAMKA Jakarta, IAIN Raden Intan Lampung, IAIN SMH Banten, STIT Agus Salim Metro, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

- Alumni Perguruan Tinggi Luar Negeri: Universitas Al-Azhar Cairo Mesir.

5. Ekstrakurikuler Santri dan Prestasi Santri Pondok Pesantren Daarul Khair

Untuk membangun dan membentuk pribadi muslim yang kreatif, mandiri dan sebagai antisipasi di masa depan, maka para santri diarahkan dengan berbagai kegiatan seperti:

- 
- a. Organisasi Ikatan Santri Daarul Khair (ISDA)
 - b. Pramuka
 - c. Latihan Pidato 3 bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia)
 - d. Beladiri Pagar Nusa
 - e. Drumband
 - f. Kursus Komputer
 - g. Mawaris
 - h. Tilawatil Qur'an
 - i. Tahfizul Qur'an
 - j. Kaligrafi
 - k. Kursus Bahasa
 - l. Persada (Persatuan Senan Daarul Khair)
 - m. Qosidah
 - n. Hadroh
 - o. Futsal
 - p. Voly
 - q. Bulu Tangkis
 - r. Marhaban

Prestasi Santri sebagai berikut:

- a. Juara 1 Lomba Tahfidz 5 Juz Aksioma Tingkat Provinsi Lampung
- b. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat Provinsi Lampung
- c. Juara 1 Lomba Qasidah Tingkat Remaja se-Kabupaten Lampung Utara
- d. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia se-Kabupaten Lampung Utara
- e. Juara 1 Lomba Kaligrafi MA Putra se-Kabupaten Lampung Utara
- f. Juara 1 Lomba Kaligrafi Penggalang pada Kemah Madrasah
- g. Juara 2 Lomba Kaligrafi Penegak pada Kemah Madrasah Kemenag LU
- h. Juara 2 Ketangkasan Pramuka Penegak pada Kemah Madrasah
- i. Juara Umum Lomba Qasidah Tingkat Anak-Anak Harlah NU

j. Juara Umum Lomba Dramband Sambut Muharram 1436 H

6. Fasilitas dan Aktivitas Santri Pondok Pesantren Daarul Khair

a. Fasilitas

Jumlah Asrama Santri

a. Putra	:	10 ruang
b. Putri	:	6 ruang
Jumlah	:	16 ruang

Jumlah Asrama Ustadz

a. Putra	:	6 ruang
b. Putri	:	5 ruang
Jumlah	:	11 ruang

Jumlah Sarana Prasarana Belajar

a. Lokal Belajar	:	11 ruang
b. Kantor	:	2 ruang
c. Ruang Pimp. Pondok	:	1 ruang
d. Masjid	:	1 ruang
e. Lab. Komputer	:	1 ruang
f. Gedung Pertemuan	:	1 ruang
g. Perpustakaan	:	1 ruang
h. Media Audio Visual	:	1 ruang
i. Lab. Komputer	:	1 ruang
j. Sarana Olahraga	:	1 ruang
Jumlah	:	21 ruang

Jumlah Ruang Penglengkap

a. Dapur Umum	:	1 ruang
b. Kamar Mandi	:	35
c. Air Mineral	:	1 ruang
d. Foto Copy dan Alat Tulis	:	1 ruang
Jumlah	:	38 ruang

b. Aktivitas Santri

4.3

Waktu dan Aktivitas Santri

WAKTU	AKTIFITAS
03.00-04.30	Shalat Malam
04.30-05.15	Shalat Subuh dan Tadarus Al-Qur'an
05.15-06.00	Pengajian Kitab dan Muhadatsah (Conversation)
06.00-07.00	Mandi dan Sarapan Pagi
07.00-07.30	Shalat Dhuha
07.30-12.30	Belajar Klasikal

12.30-12.50	Shalat Dzuhur
12.50-13.30	Makan Siang
13.30-14.35	Belajar Klasikal
14.35-16.00	Shalat Ashar dan Tadarus Al-Qur'an
16.00-17.00	Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga
17.00-17.45	Mandi dan Makan Sore
17.45-18.30	Shalat Magrib
18.30-19.30	Belajar Al-Qur'an
19.30-20.00	Shalat Isya dan Tadarus Al-Qur'an
20.00-21.30	Belajar Malam dan Pengajian Kitab
21.30-22.00	Pemberian Mufradat (Vocabularies)
22.00-22.15	Persiapan Istirahat Malam
22.15-03.30	Istirahat Malam

7. Tata Tertib Pondok Pesantren Daarul Khair

a. Tata Tertib Guru dan Karyawan/ Pegawai

- 1) Hari dinas selama 6 hari kerja
- 2) Selambat-lambatnya hadir 10 menit sebelum bel masuk
- 3) Mempersiapkan sarana dan kelengkapan
- 4) Mengisi daftar hadir saat datang dan pulang
- 5) Mengisi jurnal kegiatan sehari-hari
- 6) Mengumpulkan jurnal kegiatan setiap hari sabtu siang
- 7) Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah dibuat
- 8) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
- 9) Memahami dan mengamalkan wawasan wiyata mandala
- 10) Apabila berhalangan hadir dalam dinas, harus:
 - a. Ada pemberitahuan (surat, kurir, telpon)
 - b. Memberikan/ mengirimkan tugas mengajar bagi guru melalui guru piket
- 11) Memakai seragam
 - a. Hari Senin dan Selasa memakai warna kuning
 - b. Hari Rabu memakai baju putih bawahan hitam/ gelap
 - c. Hari Kamis memakai kemeja dan dasi (Pria), batik (Perempuan)
 - d. Hari Sabtu memakai pramuka
 - e. Hari Minggu memakai kaos olahraga
- 12) Mengikuti upacara bendera setiap hari senin/ hari besar nasional
- 13) Melaksanakan tugas menjadi Pembina upacara sesuai dengan jadwal

b. Tugas dan Tanggung Jawab Piket Rayon

- 1) Mengecek santri yang berada di Asrama pada saat jam belajar dan ibadah sedang berlangsung tanpa uzur dan mencatatnya di buku piket serta wajib melaporkannya ba'da sholat 'ashar ke bagian keamanan/ bagian ibadah/ Majelis pengasuhan santri setiap hari.
- 2) Membunyikan bel sarapan pagi pada pukul 06.30 WIB
- 3) Membunyikan bel shalat dhuha pada pukul 06.50 WIB
- 4) Membunyikan bel makan siang pada pukul 12.30 WIB
- 5) Membunyikan bel makan sore pada pukul 17.00 WIB
- 6) Membunyikan bel belajar malam pada pukul 20.00 WIB
- 7) Membunyikan bel pemberian mufrodat dan tidur malam pada pukul 22.30 WIB
- 8) Membunyikan bel setiap 10 menit sebelum adzan shalat dikumandangkan kecuali waktu shalat dzuhur
- 9) Lima belas (15) menit sebelum adzan shalat dikumandangkan, petugas piket memberikan aba-aba kepada seluruh santri untuk segera meninggalkan asrama menuju masjid
- 10) Mengecek dan merapihkan sandal dan sepatu serta peralatan yang lain berserakkan dilingkungan asrama
- 11) Mengambil nasi dan obat di bagian kesehatan untuk santri yang sakit
- 12) Mengambil dan mengisi ulang air minum di Koprasi
- 13) Mencatat asrama-asrama yang kotor dan tidak rapih di buku piket dan melaporkannya kebagian kebersihan ba'da shalat 'ashar setiap hari
- 14) Memeriksa dan mengunci kamar-kamar yang belum terkunci pada saat jam belajar dan ibadah langsung
- 15) Mencatat pelanggaran dan pelanggarannya yang terjadi pada hari itu di buku piket dan melaporkannya kebagian keamanan ba'da shalat 'ashar setiap hari
- 16) Piket rayon wajib mengisi buku harian piket asrama sebelum tidur malam dan melaporkannya ke bagian keamanan/ Majelis pengasuh
- 17) Piket rayon yang tidak menjalankan tugasnya akan dikenakan Sanksi
- 18) Jalankan tugas dengan penuh amanah.

c. Disiplin Asrama/ Kamar

- 1) Santri wajib menempati dan tidur di kamar yang telah ditentukan
- 2) Santri wajib mempunyai kasur, bantal, karpet, dan sandal
- 3) Santri wajib tidur di kamar pada pukul 22.30 dan bangun pada pukul 03.30 setiap hari
- 4) Santri wajib membersihkan dan merapihkan kamar dan alat tidur setiap pagi dan sor

- 5) Santri wajib berbahasa resmi (Arab dan Inggris) tinggalkan bahasa Daerah
- 6) Santri tidak boleh membuat keributan dan kegaduhan, atau berteriak-teriak di dalam dan di luar kamar (Lingkungan pondok)
- 7) Santri wajib memiliki peralatan makan, mandi, dan ibadah serta alat-alat wajib belajar masing-masing
- 8) Santri tidak boleh makan berkeliaran dan atau di dalam kamar, kecuali sakit
- 9) Santri wajib makan tepat pada waktunya, mengambil nasi sendiri-sendiri dengan membawa alat sendiri dan antri tidak gaduh
- 10) Santri dilarang lewat dan masuk ke dapur selain jam makan, kecuali bulis yang bertugas
- 11) Santri dilarang membawa, memiliki, dan memakai:
 - a. Hand Phone (HP)
 - b. Walkmen, Radio, Tape
 - c. Kodak
 - d. Heater (Pemanas Air)
 - e. Sajam dan Senpi
 - f. Setrika Listrik
 - g. Geam Bot/ Tetris
 - h. Kelambu
- 12) Santri hanya wajib memiliki 1 (satu) lemari dengan ukuran yang telah ditentukan pondok dan dikunci
- 13) Santri dilarang menyimpan uang lebih dari 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di asrama dan sisanya wajib dititipkan, dan jika terjadi kehilangan uang, diluar tanggung jawab pondok
- 14) Santri wajib menjaga dan merawat barang/ peralatan ataupun pakaiannya masing-masing
- 15) Santri dilarang menyimpan pakaian kotor sembarangan, dan dilarang menaikkan dan memakai sandal/ sepatu ke dalam asrama pondok
- 16) Santri wajib belajar di luar kamar pada malam hari, mulai pukul 19.30 sampai pukul 22.00 dan berpakaian rapih (bukan pakai kaos) serta mengikuti penerimaan mufrodat wajib setiap malam kecuali malam jum'at (muroja'ah mufrodat untuk kelas 1 s/d kelas 4) dan malam sabtu (muroja'ah mufrodat kelas 5 dan kelas 6)
- 17) Santri dilarang tidur dikamar setelah shalat shubuh dan wajib mengikuti pengajian kitab bersama pimpinan pondok setiap ba'da shubuh kecuali hari selasa dan jum'at (muhadatsah usbu'iyah)
- 18) Santri dilarang keras bermain kartu dan atau sejenis permainan judi lainnya.
- 19) Santri wajib memakai celana panjang, kaos/ baju ketika tidur

- 20) Santri wajib melaporkan barang bawaan/ pakaian, peralatan yang dimilikinya ke bagian keamanan
- 21) Santri wajib segera lapor ketika sakit, kehilangan barang, dan ketika terjadi perkelahian atau hal lain yang tidak dianjurkan di pondok
- 22) Ketua masing-masing kamar wajib mendata dan mengabsen anggota kamarnya setiap menjelang tidur dan do'a bersama
- 23) Seluruh santri wajib mengikuti kegiatan muhadatsah usbu'iyah pada setiap hari selasa dan jum'at pagi
- 24) Ikuti tata tertib santri dengan baik untuk kesuksesan kita bersama
- 25) Sebesar keinsafanmu sebesar itu pula kesuksesanmu dan keberuntunganmu.

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan

Setelah menyajikan data sekunder yaitu berupa teori-teori yang peneliti peroleh dari hasil membaca dan memahami dari berbagai referensi, kemudian peneliti sajikan dalam BAB II. Langkah selanjutnya ialah menyajikan data primer yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mewawancarai 30 orang santri pondok pesantren Daarul Khair, kemudian akan peneliti sajikan pada BAB VI. Sebelum peneliti lebih jauh menganalisa, maka peneliti terlebih dahulu memaparkan terkait pembagian harta warisan adat lampung pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, pembahasan ini sangat penting karena pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Pepadun sangat berbeda dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. yang terdapat pada Al-Qur'an. Pembahasan ini juga sangat penting agar penulis dapat menghasilkan penyimpulan secara sistematis serta objektif.

Pada dasarnya dalam pembagian harta warisan atau harta kekayaan, masyarakat Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan pembagian harta warisan adalah suatu proses mengenai berpindahnya harta seseorang, itu dibagikan bukan hanya ketika yang memberi warisan sudah wafat, tetapi dilakukan oleh pemilik harta tersebut dalam keadaan belum meninggal dunia agar dapat dijalankan atau diteruskan kepada ahli warisnya.

Pada dasarnya masyarakat Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan menganut atau mayoritas beragama Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagia harta warisan masyarakat menggunakan sistem pembaian harta warisan yang tertera pada pemangku adat yang selama ini diyakini oleh sebagian masyarakat. Masyarakat tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an atau hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang berbeda pendapat sehingg sering terjadinya perdebatan. Sehingga banyaknya masyarakat beranggapan bahwa pembagian menurut hukum Islam itu tidak sesuai dengan kondisi keluarga.

Pada masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, yang menarik dalam pembagian harta warisan adalah mereka tidak menggunakan sistem pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan. Meraka lebih mengedepankan anak laki-laki pertama pada pembagian harta warisan itu lebih banyak dari pada anak laki-laki yang kedua maupun yang terakhir. Pada anak perempuan juga pembagiannya lebih kecil dari pada anak laki-laki yang pertama.

Hal tersebut juga terjadi di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, pada pembagian harta warisan itu mereka menggunakan sistem musyawarah mufakat antara keluarga satu dengan yang lain setiap kali akan diadakannya pembagian harta warisan. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak ada perdebatan atau selisih paham untuk si penerima warisan, sehingga tidak terjadi keributan.

C. Hasil Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi

Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 30 orang santri pondok pesantren Daarul Khair ialah:

Harta warisan dalam Islam adalah sebuah harta peninggalan orang Islam yang sudah meninggal dunia, jadi didalam Islam itu pengertiannya ada dua ilmu faraid dan ilmu muwaris. Ilmu faraid yang maksudnya adalah sebuah harta warisan yang dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkan harta tersebut dan berapa kadar yang wajib diberikan kepada orang tersebut dan tata cara pembagian harta warisan tersebut.¹

Warisan atau faraid adalah peninggalan harta bagi seorang yang telah meninggal yang dia itu bisa kita ketahui pembagiannya, masing-masing ahli waris itu apa aja pembagiannya. Jadi, ada ketentuannya masing-masing cara pembagiannya itu seperti apa, orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu siapa saja.²

Harta warisan tersebut dapat dibagikan apabila hajat atau hal-hal terkait yang mengenai orang yang meninggal tersebut telah terpenuhi seperti biaya perawatan jenazah, biaya pemakaman, biaya pemandian jenazah, ataupun hutang-hutang yang meninggal telah terpenuhi atau permintaan orang yang meninggal seperti misalnya, orang yang meninggal tersebut sebelum meninggal memiliki wasiat kepada ahli warisnya seperti “saya ingin apabila saya telah meninggal harta warisan saya sebagian untuk diwakafkan, disedekahkan untuk rakyat-rakyat miskin atau untuk pembangunan masjid” sebagian apabila sudah terpenuhi maka, dapat dibagikan kepada ahli waris.³

¹ Wawancara dengan Ghufrotul Evi Lutfiah, 2 Febuari 2019, Pada Pukul 13.23.

² Wawancara dengan Aishah Khoirunnisa, 2 Febuari 2019, Pada Pukul 12.57.

³ Wawancara denngan Faiz Khoiril Umam , 2 Febuari 2019, Pada Pukul 13.55 .

Pembagian harta warisan adat dan didalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam itu sangat berbeda. Mengapa demikian, karena pembagian harta warisan di dalam Adat itu tidak ada keadilan terhusus untuk anak laki-laki yang kedua ketiga maupun yang terakhir. Karena didalam Adat pembagiannya itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an. Dan pembagian harta warisan juga pada masyarakat adat Lampung Pepadun itu dibagikan ketika seseorang yang mempunyai harta warisan itu masih hidup dan diberikan kepada ahli waris yang pembagiannya itu tidak menggunakan syariat Islam melainkan sesuai dengan sistem Adat.

Pembagian harta warisan diperlukan karena apabila harta warisan tidak dibagikan secara adil dan jelas maka akan menimbulkan pertengkaran atau permusuhan bagi tiap-tiap yang menerima harta warisan, dikarenakan adanya perbedaan pembagian harta warisan yang tidak adil maka dari itu Islam menentukan ilmu pembagian harta warisan yakni yang disebut ilmu faraid, dikarenakan di dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan.⁴

Di dalam al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasannya bagian satu anak laki-laki itu ashabah dari seluruh bagian harta. Jadi, mau dia anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga dalam ketentuan pembagian anak laki-lakiayat mendapatkan ashabah. Jadi tidak ada perbedaan mau dia anak laki-laki pertama, kedua, atau ketiga semua samar rata.⁵

Berbeda dengan pendapat Fais menurut adat istiadat iya, mungkin bisa terjadi antara anak laki-laki pertama dan anak laki-laki kedua lebih banyak. Akan tetapi Islam menjelaskan bahwasannya dan disebutkannya didalam al-Qur'an yang tersebut hanyalah anak laki-laki jatah anak laki-laki adalah sisa tidak menyebutkan perbedaan anak laki-laki satu dan anak laki-laki dua. Mungkin kalo ingin mengikuti pembagian secara adat boleh, mungkin kalo ingin mengikuti secara agama Islam ya sama, setara antara anak laki-laki satu atau yng kedua. Karena, di dalam al-Qur'an itu tidak dijelaskan perbedaan anara anak laki-laki pertama, kedua dan seterusnya untuk mendapatkan harta warisan.⁶

⁴ Wawancara dengan Firmansyah, 2 Febuari 2019 pada pukul, pada pukul 13.40.

⁵ Wawancara dengan Ghufrotul Evi Lutfiah, 2 Febuari 2019, pada pukul 13.23.

⁶ Wawancara dengan Faiz Khoirul Umam pada, 2Febuari 2019, pada pukul 13.55.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, pada pembagian harta warisan dalam Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sudah tertera di surah an-Nisa ayat 11-12 dan harus mengikuti ayat tersebut. Karena Islam adalah sebaik-baiknya agama yaitu *rahmatul lil'alam*. Jadi, hukum didalam Islam itu aturan yang sudah Allah tetapkan dan sudah menjadi pedoman umat Islam.

D. Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Prespektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair

Berdasarkan pemaparan terkait pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan terjadi karena banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan kearah Adat dari pada berpedoman pada al-Qur'an. Perbedaan tersebut dikarenakan berbeda pemahaman masyarakat Desa Kota Alam terutama yang bersuku Lampung Pepadun mereka beranggapan bahwa mengikuti ilmu *faraid* itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka serta keadaan di dalam keluarga.

Pemikiran yang ada pada suku adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, bahwa pembagian harta warisan mereka berpegang teguh pada aturan adat. Pembagian harta warisan pada anak laki-laki yang pertama itu lebih memperoleh harta warisan lebih banyak dengan alasan karena anak laki-laki yang pertama itu adalah sebagai

penerus keturunan keluarga dan menjadi pengikut adik-adiknya. Berbeda dengan anak laki-laki yang kedua, ketiga, maupun anak laki-laki bungsu itu mereka mendapatkan bagian seadanya tanpa harus memikirkan keadaan mereka yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Padahal jika kita lihat dari status mereka sama-sama anak laki-laki dan sama-sama kelak akan menjadi seseorang pemimpin dan pengikut untuk adik-adiknya. Hal semacam ini sangat bertentangan dengan kewarisan di dalam Islam, sedangkan Islam sangat menjunjung sekali keadilan. Dan di dalam Islam juga tidak ada perbedaan antara anak laki-laki pertama, kedua, maupun anak bungsu. Melainkan Allah telah mengatur pembagian itu sama rata dan tidak ada pembeda.

Dalam hal ketentuan keluarga bahwa anak laki-laki pertama itu adalah penerus keturunan dan menjadi pengikut untuk adik-adiknya. Dalam hal ini jika anak laki-laki pertama tidak bisa menjadi anak yang diharapkan keluarga untuk meneruskan keturunan dari orangtua mereka dan tidak bisa menjadi pengikut dan panutan untuk adik-adiknya. Maka, harta warisan yang dibagikan dengan lebih banyaknya jumlah anak laki-laki pertama dari pada anak laki-laki yang lain itu sangat tidak adil sekali. Kita lihat yang terjadi pada masyarakat dalam pengurusan orang tua yang sudah berusia lanjut, sering terjadi dan kebanyakan orangtua diurus oleh anak perempuan, tetapi pembagian harta warisan anak perempuan itu lebih sedikit dan pada masyarakat adat Lampung Pepadun anak perempuan tidak berhak untuk keberlangsungan hidup orangtuanya. Tidak bisa kita pungkiri

bahwa anak laki-laki pertama itu tidak bisa menjadi patokan didalam keluarga.

Dalam memahami ketentuan al-Quran dan al-Hadits untuk dijelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat, perlu diketahui bahwa tujuan Allah dalam ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an itu sebagai gambaran yang tertulis dan harus diikuti serta dipelajari.

Oleh sebab itu Islam meyakini adanya *urf* atau adat merupakan suatu sumber dari hukum Islam. Perlu diketahui bahwa hukum Islam membiarkan hukum adat ditegakkan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak ada kesalah pahaman dan tidak terjadi pertengkaran serta perselisihan, karena Islam agama yang menegakkan keadilan. Karena adat yang sudah melekat pada seseorang itu adalah suatu hal yang selalu dilaksanakan sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Dimana hukum adat itu dilahirkan disitulah hukum adat tersebut digunakan.

Begitu pula pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat Lampung Pepadun, mereka membagi harta warisan tersebut dengan cara bermusyawarah dan mufakat antar keluarga. Agar terciptanya keluarga yang harmonis dan menghindari pertengkaran serta perselisihan. Maka pembagian harta warisan tersebut dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan ahli waris.

Karena sudah banyak kejadian didalam keluarga terpecah belah bahkan ada yang berhujung dengan kematian dikarenakan harta warisan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan pihak yang menerima harta warisan

tersebut merasa tidak adil atas pembagian yang mereka peroleh. Dengan saudaranya yang tidak memperoleh harta warisan yang sama maka terjadilah rasa iri dengki dan mengakibatkan pertengkaran.

Dalam pembagian harta warisan ini juga, kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta warisan diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagianya”.

Jika pembagian harta warisan dengan mengikuti ilmu *faraid* banyak menimbulkan kemudharatan maka dicari cara untuk menghindari hal tersebut. Apa yang menjadi hal yang mudharat itu harus dihilangkan, sebagaimana disebutkan didalam *usul fiqh* (kemudharatan itu harus dihilangkan). Maka ketika dapat dicari pendapat lain agar dapat menghilangkan kemudharatan maka hal ini dapat dikerjakan.

E. Analisis Prespektif Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Tentang Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun

Untuk menganalisis pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun pada masyarakat Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan ditinjau dari prespektif santri, terdapat ketidaksamaan pendapat. Masalah tersebut dapat dilihat pada tujuan dan alasan masyarakat memakai aturan-aturan itu. Sesuai dengan hal tersebut yang dipaparkan sebelumnya, ada

alasan-alasan orangtua terdapat pembagian warisan pada anaknya ketika orangtua belum wafat.

Bagi orangtua yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bermusyawarah dan mufakat bersama keluarga, dengan alasan untuk menghindari terjadinya persengketaan di antara anak-anaknya yang memperoleh harta warisan. Ketika penyusun melakukan wawancara dengan santri pondok pesantren Daarul Khair Kotabumi yang berjumlah 30 orang santri, hal tersebut diperkuat dengan jawaban mereka yang beragam, yaitu ada sebagian yang berpendapat bahwa memperbolehkan tetapi dengan syarat hal tersebut bukan merupakan suatu proses dalam penerimaan harta yang diwarisi. Oleh sebab itu pada pewarisan yang menggunakan hukum Islam tidak mengetahui hal tersebut, yaitu harta warisan yang sudah dibagi ketika pewaris belum wafat.

Pembagian harta warisan dengan kadar anak laki-laki pertama lebih banyak dari pada pembagian harta warisan anak laki-laki kedua, ketiga maupun yang terakhir, hal tersebut dirasa sudah tidak pantas lagi di masyarakat saat ini. Ada beberapa pendapat santri yang tidak menyetujui mengikuti sistem adat, mereka berpendapat bahwa pembagian harta warisan yang baik itu mengikuti aturan Allah yang tertera di dalam al-Qur'an.

Sebagaimana Menurut Nurhidayati Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa pembagian anak laki-laki itu semua sama tidak ada pembeda yaitu, 2:1, karena terdapat pada al - Qur'an surah An – Nisa ayat 11 sampai dengan 12 sudah dijelaskan kadar, karena harus diterima oleh ahli waris dan siapa saja yang berhak menerima harta tersebut.⁷

⁷ Wawancara dengan Nurhidayati pada, 2 Febuari 2019, pada pukul 13.55.

Berbeda dengan pendapat sebagian santri yang memperbolehkan mengikuti sistem adat selagi itu tidak bertentangan dengan Islam salah satunya adalah Firmansyah dan Faiz Khoirul Umam, yang lebih cenderung menyetujui bahwa hukum adat itu ada dan dipebolehkan untuk dipergunakan selama tidak merugikan orang lain. Di dalam al-Qur'an terkandung nasakh (pembatalan) maka dari itu, bagian 2:1 dapat dibatalkan (dinasakhkan). Masalah tersebut berdasarkan dengan adanya budaya dan adat setempat.

Urf diakui sebagai salah satu sumber hukum islam karena, terlihat dari kejadian yang ada di masyarakat suatu kebiasaan yang turun termurun sudah melekat pada masyarakat tersebut dan berperan untung mengatur hubungan yang ada pada masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang diakui tidak tertulis, akan tetapi dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Maka dari itu hukum adat diperbolehkan dalam Islam selama tetap memegang pada prinsip ketuhanan, keyakinan, serta keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan paparan diatas terdapat perbedaan yang sangat bertentangan terhadap suatu konsep pewarisan sesuai tradisi masyarakat setempat berdasarkan konsep dalam pewarisan Islam. Terdapat ketidaksamaan yang sangat terlihat perbedaan antara anak laki-laki pertama lebih banyak memperoleh bagian harta warisan dari pada anak laki-laki yang kedua, ketiga, dan yang terakhir, dimana bagian anak laki-laki tersebut dibedakan dengan bagian anak laki-laki yang pertama.

Praktik kewarisan di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melingkupi masyarakatnya, sehingga masyarakat tersebut masih banyak yang mengikuti adat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pada hal ini, praktik kewarisan di Desa Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan dapat dipandang dari hasil kontruksi sosial. Berdasarkan masalah tersebut, Islam melihat pelaksanaan hal tersebut sebagai *urf* serta *adat* yang ada dalam masyarakat di suatu Desa. Maka dari itu dipandang dari cara bermasyarakat pada pelaksanaan sistem pewarisan itu dapat dinilai sah saja, untuk masyarakat yang menjadikannya tradisi. Maka dari itu dapat dinilai masyarakat yang sesuai pada hati nurani sebagai perwujudan masyarakat dengan keadaan sosial di sekitarnya. Pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam kondisi lingkungan yang berbeda, dapat menimbulkan perbedaan antara nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat setempat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.

F. Temuan Penelitian

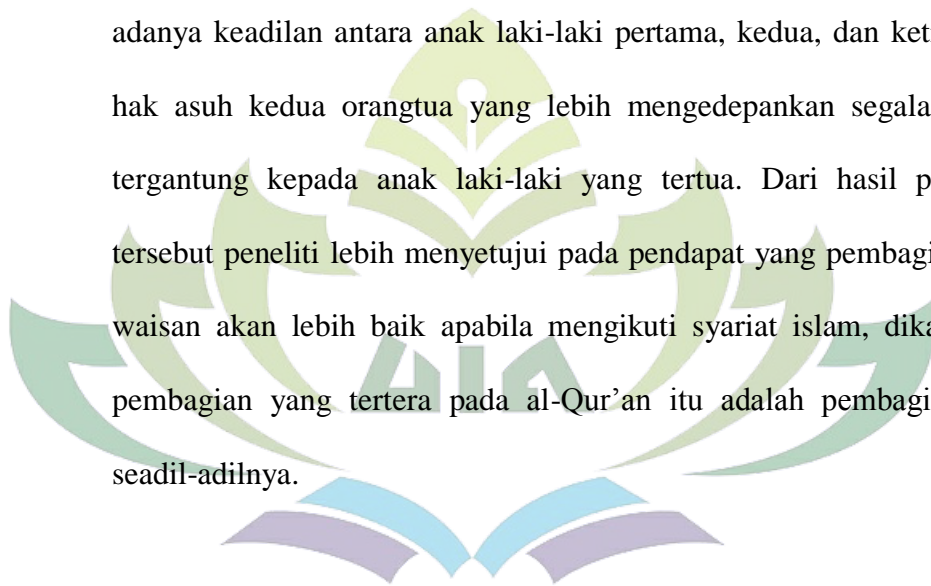
1. Pada masyarakat Adat Lampung Pepadun, hibah di bagikan ketika orang tua masih hidup. Dilakukan demikian karena, yang dikhawatirkan orang tua adalah adanya perselisihan atau pertengkaran antar anak satu dengan yang lain dan tidak ada kecemburuan sosial ketika orang tua

sudah membagi dengan takaran masing-masing anak laki-laki maupun perempuan.

2. Selain itu juga orang tua dan anak-anak berkumpul untuk memusyawarahkan masing-masing bagian mereka. Dengan pertimbangan, anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak dengan pertimbangan karena, anak laki-laki akan berkeluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap orang tuanya, adik-adinya, istri dan anak-anaknya serta takaran untuk anak laki-laki tertua lebih banyak dari pada anak laki-laki yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan anak perempuan lebih sedikit dari anak laki-laki karena, pertimbangan anak perempuan akan ikut dengan suami dan sudah menjadi hak dan kewajiban seorang suami. Serta anak perempuan tidak berhak atas hak asuh kedua orangtua serta adi-adik yang berada di bawahnya.
3. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang berada di Desa Kota Alam, itu juga terdapat beberapa keluarga yang pembagian harta warisannya menurut syariat Islam atau aturan yang telah tertera pada al-Qur'an. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga Bapak H. Cik Mut.
4. Menurut pandangan santri Pondok Pesantren Daarul Khair terkait pembagian harta warisan berbeda-beda ada yang lebih cenderung menyetujui dengan jumlah 13 orang santri bahwa hukum adat itu ada dan dipebolehkan untuk dipergunakan selama tidak merugikan orang lain dan ada pula yang menyetujui dengan jumlah 17 orang santri, mereka berpendapat bahwa pembagian menurut islam karena aturan

pembagian harta warisan itu sudah diatur oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an dan sudah jelas, serta mengikuti aturan syariat Islam itu lebih baik.

Pada penelitian tersebut dapat kita ambil nilai positif yang terjadi pada masyarakat tersebut, bahwa apa yang menjadi aturan adat itu bertujuan baik untuk keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anaknya dan nilai negatifnya pada pembagian sistem adat tersebut tidak adanya keadilan antara anak laki-laki pertama, kedua, dan ketiga serta hak asuh kedua orangtua yang lebih mengedepankan segala sesuatu tergantung kepada anak laki-laki yang tertua. Dari hasil penelitian tersebut peneliti lebih menyetujui pada pendapat yang pembagian harta wasian akan lebih baik apabila mengikuti syariat islam, dikarenakan pembagian yang tertera pada al-Qur'an itu adalah pembagian yang seadil-adilnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Cara pembagian harta warisan yang ada dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Alam harta warisan di bagikan ketika orang tua masih hidup. Dilakukan demikian karena, orang tua khawatir adanya perselisihan atau pertengkaran antar anak satu dengan yang lain, serta tidak ada kecemburuan sosial ketika orang tua sudah membagi dengan takaran masing-masing anak laki-laki maupun perempuan.

Dengan pertimbangan, anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak karena, anak laki-laki akan berkeluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap orang tuanya, adik-adiknya, istri dan anak-anaknya serta takaran untuk anak laki-laki tertua lebih banyak dari pada anak laki-laki yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Sedangkan anak perempuan lebih sedikit dari anak laki-laki karena, pertimbangan anak perempuan akan ikut dengan suami dan sudah menjadi hak dan kewajiban seorang suami. Serta anak perempuan tidak berhak atas hak asuh kedua orangtua serta adik-adik yang berada di bawahnya.

2. Menurut pandangan 30 orang santri Pondok Pesantren Daarul Khair terkait pembagian harta warisan berbeda-beda ada yang lebih cenderung menyetujui bahwa hukum adat itu ada dan diperbolehkan untuk dipergunakan selama tidak merugikan orang lain.

Serta ada pula yang menyetujui bahwa pembagian menurut islam itu lebih baik karena sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Dari hasil penelitian tersebut penulis lebih menyetujui pada pendapat yang ke dua yaitu pembagian harta warisan akan lebih baik apabila mengikuti syariat islam.

B. SARAN

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat

Agar masyarakat adat lampung pepadun dapat mengetahui pembagian harta warisan yang baik dan benar menurut Islam.

2. Pondok Pesantren

Agar pondok pesantren lebih memberikan pemahaman kepada santrinya agar mengetahui mengenai pembagian harta warisan yang benar menurut Islam.

3. Santri

Agar santri dapat memahami perbedaan antara pembagian harta warisan menurut adat Lampung Pepadun dan menurut Islam dan dapat menerapkan pembagian harta warisan yang benar menurut Islam.

4. **Peneliti**

Agar penelitian ini tidak hanya sampai disini melainkan dapat di kembangkan lagi oleh peneliti lain dan dapat pula menjadi wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Diponogoro. Jakarta. 2015.

Ardee, "Masyarakat Adat Lampung Peepadun", diakses dari
<https://www.indonesiakaya.com>, pada tanggal 1 Oktober 2018

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2014)

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011)

Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Fikri, Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*, (Surakarta:
IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1978)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Hilman Hadikusuma, *“Hukum Waris Adat”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)

Imam Syafe’I, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, (Al Tazqiah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 8 No 1 2017)

Kusnadi, *Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam*, (Pringsewu: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 2, Mei 2017)

Marghono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok Jawa Barat: PT. Fathan Prima Media, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)

Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Soepomo, *“Bab-bab Tentang Hukum Adat”*, Penerbitan Universitas, 1967

Usman el-Qurtuby, *“Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir bil-Hadis)”*,

penerbit Cordoba, 2013

Wirjono Prodjodikoro SH, Dr. R., *“Hukum Warisan di Indonesia”* Sumun Bandung

1976, cetakan kelimas

